

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengangguran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai anggota ASEAN dan G20. Meskipun Indonesia terus berupaya mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, masalah dalam penyerapan tenaga kerja masih menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi (Dian, 2023).

Berdasarkan laporan World Economic Outlook dari IMF pada April 2024, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,2%, yang merupakan angka tertinggi di antara lima negara ASEAN yang dibandingkan. Data statistic menunjukkan bahwa pada Februari 2024 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta orang. Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 790 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, pengangguran tetap menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

Setiap negara tentu mengharapkan tingkat pengangguran yang rendah. Namun pada kenyataannya, pengangguran tetap terjadi meskipun kondisi perekonomian sedang stabil. Jika tidak segera ditangani, pengangguran dapat memicu permasalahan sosial, termasuk meningkatnya angka kemiskinan. (Buswari et al., 2023).

Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah tingginya standar pendidikan yang dipersyaratkan oleh dunia kerja. Banyak perusahaan menuntut calon pekerja memiliki setidaknya ijazah sarjana, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran terutama di kalangan lulusan sekolah menengah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu segera merumuskan kebijakan strategis dan sistematis dalam mengatasi pengangguran. Menurut (Mankiw, 2000), seseorang dikategorikan menganggur apabila ia tidak bekerja, sedang aktif mencari pekerjaan, atau sedang menunggu untuk memulai pekerjaan baru.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran di 5 Provinsi di Indonesia 2019-2023

Provinsi	Tahun (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Banten	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52
Kep.Riau	7,5	10,34	9,91	8,23	6,8
Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44
DKI Jakarta	6,54	10,95	8,5	7,18	6,53
Papua Barat	6,43	6,8	5,84	5,37	5,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2023 (Data Diolah)

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa lima provinsi, yaitu Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua Barat, secara konsisten mencatat tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka nasional pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,45%, sedangkan di kelima provinsi penelitian ini, rata-ratanya mencapai 6,46%. Artinya, tingkat pengangguran di daerah industri ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru. Menurut (Amrullah et al., 2019), peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) menandakan peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Kelima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat, merupakan pusat industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara berfungsi sebagai pusat bisnis dan jasa, Banten dan Jawa Barat dikenal dengan kawasan industri manufakturnya, Kepulauan Riau menonjol di sektor industri galangan kapal dan pariwisata, sementara Papua Barat memiliki sektor industri ekstraktif yang kuat.

Dengan industri yang beragam tersebut seharusnya mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kelima provinsi ini tetap tinggi dalam satu dekade terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang bukan merupakan pusat industri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), pertumbuhan ekonomi di kelima provinsi tersebut pada periode 2013–2023 menunjukkan tren yang umumnya positif. DKI Jakarta mengalami kenaikan dari Rp1.836.000 miliar pada 2019 menjadi Rp2.050.000 miliar pada 2023, yang berada jauh di atas rata-rata PDRB provinsi nasional sebesar Rp627.000 miliar pada tahun 2023. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, hal ini belum berhasil menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan. Seharusnya, Pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja baru. Menurut (Amrullah et al., 2019), peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) menandakan peningkatan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Tingkat upah minimum juga mengalami peningkatan di lima provinsi tersebut selama periode yang sama. Secara nasional, rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) Indonesia 2023 mencapai Rp 2.923.309 (Kemnaker,2024). DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan upah minimum tertinggi, yaitu Rp4.901.798, diikuti oleh Papua Barat dengan Rp3.553.262, Kepulauan Riau Rp3.378.468, Banten Rp3.245.111, dan Jawa Barat Rp3.097.679. Kenaikan upah minimum secara teori, seharusnya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong partisipasi dalam dunia kerja (Aruan & Sriyono, 2016). Namun, meskipun upah minimum telah meningkat signifikan, fenomena ini tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran. Menurut Prawira (2018), kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi juga dapat berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena meningkatkan beban biaya operasional perusahaan.

Selain faktor upah, tingkat inflasi juga memengaruhi pengangguran. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa inflasi di lima provinsi cenderung menurun selama periode 2013–2023. Rata-rata inflasi nasional Indonesia selama periode tersebut tercatat sekitar 3,1% per tahun. DKI Jakarta dan Banten mencatatkan inflasi yang lebih rendah dari rata-rata nasional, sementara Papua Barat dan Kepulauan Riau mengalami inflasi yang lebih tinggi pada beberapa tahun, terutama pasca-pandemi. Meskipun, inflasi secara umum menurun di seluruh provinsi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran, yang bertentangan dengan teori

ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa inflasi yang menurun akan diikuti dengan turunnya tingkat pengangguran (Fahrudin & Sumitra, 2020).

Tingkat pendidikan di lima provinsi tersebut juga mengalami peningkatan selama periode 2013-2023, yang diukur dari rata-rata lama sekolah. Secara umum, peningkatan rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas sumber daya manusia (Maulidah & Soejoto, 2017). Rata-rata lama sekolah nasional Indonesia pada tahun 2023 mencapai 8,5 tahun, sedangkan DKI Jakarta memiliki rata-rata yang lebih tinggi, di atas 12 tahun. Tingkat pendidikan di lima provinsi tersebut juga mengalami peningkatan, Namun, tingginya tingkat pendidikan tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran, yang bertentangan dengan asumsi dasar bahwa pendidikan yang lebih tinggi akan memperkecil risiko pengangguran. Mengindikasikan adanya faktor lain yang turut memengaruhi pasar tenaga kerja, seperti ketersediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap tingkat pengangguran. (Pamungkas et al., 2024) menemukan bahwa inflasi dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran, sedangkan Pramastuti dan (Anggita, 2017) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif tidak signifikan dan UMK memiliki pengaruh negatif signifikan. Di sisi lain, Herniwati dan (Handayani, 2019) menemukan bahwa pendidikan dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. (Septiyanto dan Tusianti, 2020) bahkan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran di Indonesia bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak variabel.

Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Meskipun provinsi-provinsi tersebut menunjukkan indikator ekonomi yang positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat dengan PDRB yang terus meningkat, tingkat upah minimum yang naik secara signifikan, tingkat pendidikan yang semakin membaik yang dilihat dari peningkatan rata-rata

lama sekolah, serta tingkat inflasi yang cenderung terkendali, namun tingkat pengangguran di lima provinsi ini masih tergolong tinggi daripada provinsi lainnya di Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kondisi ekonomi makro dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian ini dengan judul "**Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Inflasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pengangguran (di Lima Provinsi Dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi) di Indonesia 2013-2023.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama periode 2013-2023?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama periode 2013-2023?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan guna mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Menganalisis perkembangan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama periode 2013-2023.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, dan tingkat Pendidikan terhadap tingkat pengangguran di lima provinsi dengan tingkat tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia selama periode 2013-2023?

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini bisa dijabarkan di bawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memberi pengaruh pengangguran di Indonesia. Dengan menyediakan data aktual terbaru, penelitian ini mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, inflasi, tingkat pendidikan, serta pengangguran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru tentang dinamika pengangguran di Indonesia, serta memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dalam mengatasi masalah pengangguran.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Pemerintah:

Temuan penelitian ini bisa dipergunakan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang strategis guna mengurangi pengangguran di provinsi-provinsi dengan tingkat pengangguran tinggi.

B. Bagi Akademisi:

Penelitian ini bisa digunakan menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan pengangguran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia.

C. Bagi Masyarakat:

Memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika pengangguran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan demikian mampu meningkatkan kesadaran dalam pengembangan keterampilan dan pendidikan.